

“HISTORIOGRAFI PEMBEBASAN”: SUATU ALTERNATIF

Singgih Tri Sulistiyono*

Abstrak

Terdapat banyak sinyalemen yang mengatakan historiografi Indonesia telah tidak mampu menunaikan fungsinya dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Padahal, pada saat ini masyarakat Indonesia sedang menghadapi berbagai macam persoalan seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketergantungan, eksploitasi, dan sebagainya menyusul terjadinya badai krisis ekonomi sejak tahun 1998.

Ketidakmampuan historiografi Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam memecahkan persoalan bangsa di samping disebabkan oleh keterbelengguan pada formalisme metodologi dan epistemologi, juga disebabkan oleh kekurangberanian sejarawan untuk menggugat realitas kekinian. Dalam hal inilah, “historiografi pembebasan” dapat dijadikan sebagai sebuah alternatif historiografi yang akan mampu membebaskan pikiran masyarakat dari belenggu mitos kelampauan sehingga memiliki kesadaran terhadap penyelesaian persoalan kekinian dan cita-cita di masa depan. Untuk itu, kajian “historiografi pembebasan” lebih menekankan kepada persoalan-persoalan kontemporer yang sedang menghimpit masyarakat Indonesia saat ini seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketergantungan, dan sebagainya yang sudah diterima sebagai sebuah keniscayaan. Dengan demikian, kajian “historiografi pembebasan” akan menggunakan point of departure kekinian untuk mengkaji masa lampau sehingga kajian sejarah tidak tercerabut dengan akar kepentingan masa kini. Dalam hubungan itu, “historiografi pembebasan” mengedepankan komitmen kepada nilai-nilai keindonesiaan dengan dasar kemanusiaan, yaitu kembali kepada cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Kata Kunci: Historiografi, Pembebasan

Pendahuluan

Pada bagian akhir Pidato Pengukuhan Guru Besar yang disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Universitas Gadjah Mada pada tahun 1998, Prof. Dr. Djoko Suryo menyatakan:

“...menghadapai persoalan masyarakat dan bangsa masa kini yang sedang menghadapi krisis ekonomi dan politik yang berat, maka diperlukan pemahaman dan kesadaran akan dinamika sejarah masyarakat Indonesia dari masa ke masa untuk dapat diambil pelajaran dan hikmahnya. Pendekatan sejarah diharapkan akan dapat membantu dalam memperoleh pemahaman akan

pengalaman masyarakat pada masa lampau dalam menghadapi tantangan dan jawaban terhadap masalah-masalah pada jamannya. Penguasaan pengetahuan masa lampau akan memungkinkan kita dapat memahami masa sekarang, dan berarti bahwa kegagalan dalam membaca tanda-tanda jaman masa lampau akan menggagalkan kemampuan kita membaca isyarat-isyarat jaman pada masa kini”.

Kutipan tersebut setidaknya-tidaknya mencerminkan dua hal. Pertama, sebagai sejarawan senior, beliau sangat responsif terhadap situasi krisis dan peristiwa besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya. Seperti diketahui bahwa tahun 1998 merupakan puncak terjadinya krisis moneter di mana Mata uang

rupiah kehilangan sekitar 80 persen nilai tukarnya dalam pasar uang internasional. Nilai rupiah anjlok dari sekitar Rp. 2.600 ke Rp. 18.000 per dolar Amerika. Dari bulan Desember 1997 hingga Juli 1998 angka inflasi mencapai 59,1 persen.¹ Secara umum ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga 13,7 persen.² Krisis moneter itu juga menjadi pemicu terjadinya krisis politik yang melengserkan Presiden Suharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun.

Kedua, sebagai seorang sejarawan beliau sangat yakin bahwa pemahaman dan kesadaran sejarah akan mampu membantu segenap elemen masyarakat dalam memperkuat mental dan mengembangkan strategi untuk menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung sebab pemahaman sejarah dapat memberikan pelajaran dan hikmah untuk menghadapi krisis yang sudah biasa terjadi dalam sejarah manusia. Namun demikian, jika orang gagal dalam memahami tanda-tanda jaman yang diajarkan oleh sejarah, maka orang itu akan gagal juga dalam menyelesaikan persoalan masa kini dan masa datang.

Dengan melihat apa yang diungkapkan di atas tampaknya sangat jelas bahwa pemahaman dan kesadaran sejarah sangat penting untuk memecahkan persoalan kekinian (*present*) dan kemasadatan (*future*). Di sinilah peran seorang sejarawan sebagai narator masa lampau (*past*) menjadi sangat penting. Dengan demikian karya seorang sejarawan (historiografi) memiliki peran

penting bagi masyarakat untuk memahami masa kini. Jika karya sejarawan tidak mampu menjelaskan situasi dan persoalan kekinian maka masyarakat akan gagal pula memperoleh pemahaman terhadap persoalan-persoalan kekinian yang pada gilirannya juga menyesatkan langkah di masa yang akan datang. Jika sejarawan tak mampu menjelaskan persoalan kekinian melalui karya-karya historiografinya, maka sejarah akan dipandang sebagai ilmu yang tidak ada manfaatnya untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Sejarah dipandang hanya sebagai ilmu yang hanya bicara masa lampau tanpa ada kaitannya dengan masa kini dan masa depan. Hal ini bukan sekedar pengandaian belaka. Menurut Bambang Purwanto bahwa akhir-akhir ini banyak kritik dilontarkan kepada sejarawan akademis, yaitu sejarawan yang berkecimpung di dunia ilmu sejarah pada perguruan tinggi. Kritik itu antara lain menyatakan bahwa pada saat ini tulisan-tulisan para sejarawan akademis, tidak memiliki akar persoalan dari masyarakatnya, sehingga karya-karya mereka tidak mampu mencerahkan masyarakat dan tidak memiliki sumbangan apapun bagi pemecahan persoalan aktual apalagi untuk masa yang akan datang.³ Mereka dipandang tidak menunjukkan komitmen moral dan kepedulian terhadap masyarakatnya. Dengan demikian sejarah telah kehilangan nilai sosial dan kulturalnya, sehingga tidak menampakkan tanggung jawab kepada dan relevansi bagi kehidupan kekinian. Mereka diibaratkan seperti berdiri di menara gading yang bangga terhadap kehebatan sendiri,

* Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang. Makalah ini pernah disampaikan pada Seminar Akademik dengan Tema "Historiografi Indonesia Modern" yang diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta: 29 Desember 2009). Sebagian besar makalah ini diambil dari pidato pengukuhan guru besar penulis yang berjudul "Historiografi Pembebasan untuk Indonesia Baru" (Semarang, 15 Maret 2008).

¹Prijono Tjiptoherijanto, "Economic Crisis in Indonesia: General Consequence of People's Life and Policy Implications", paper dipresentasikan pada *The Conference on the Modern Economic History of Indonesia* (Yogyakarta: 26-28 Juli 1999), hlm. 1.

² Robert Cribb, *Historical Atlas of Indonesia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2000), hlm. 188.

³ Bambang Purwanto, "Sejarawan Akademik dan Disorientasi Historiografi: Sebuah Otokritik", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada* (Yogyakarta: 28 September 2004).

namun tidak mampu menjadi pencerah bagi masyarakat.⁴ Padahal diyakini bahwa seharusnya sejarah bukan untuk kepentingan orang yang hidup pada masa lampau itu sendiri tetapi untuk kepentingan masa kini dan mendatang.⁵

Apabila kritik tersebut benar adanya, maka tidak ada waktu lagi bagi sejarawan Indonesia saat ini dan siapa pun yang peduli terhadap masa depan bangsa Indonesia untuk tidak berpikir dan menggagas sebuah historiografi alternatif yang mampu memberikan sumbangan tertentu untuk ikut menyelesaikan persoalan bangsa yang saat ini sedang berjuang mempertahankan eksistensi dan keberlangsungannya. Dalam hubungan itu, tulisan ini akan menawarkan suatu konsep historiografi alternatif yaitu “historiografi pembebasan” sebagai salah satu corak historiografi yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan kesadaran historis, aktual, dan sekaligus futurial bagi segenap masyarakat Indonesia, dan untuk selanjutnya membangkitkan semangat untuk bergerak membebaskan diri dari berbagai persoalan yang hingga saat ini tidak terpecahkan sebagaimana Profesor Djoko Suryo telah mengutip ucapan Michael Howard yang menyatakan: “*The study of history has been believed to provide a guide, not simply to passive understanding of the world, but to active political and moral action within it*”. ‘Historiografi pembebasan’ ini diharapkan dapat berperan sebagai sebuah historiografi yang mampu membebaskan cara berpikir masyarakat terhadap masa lampau dari belenggu ketidaktahuan, kepalsuan, mitos-mitos, manipulasi, dan kesalahtafsiran aktual mengenai masa lampau sehingga memberikan spirit untuk bertindak menyelesaikan permasalahan

yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Apakah itu “Historiografi Pembebasan

Dalam khasanah ilmu sejarah, istilah historiografi (*historiography*) digunakan untuk menyebut langkah terakhir dari metode penelitian sejarah, yaitu proses menyusun secara tertulis hasil temuan-temuan yang diperoleh dalam sebuah penelitian sejarah menjadi sebuah cerita yang siap untuk dibaca para pembacanya. Proses penyusunan hasil-hasil temuan penelitian sejarah itu juga sering disebut sebagai proses rekonstruksi sejarah (*reconstructing the past*) dengan asumsi bahwa masa lampau sebagai aktualitas merupakan sebuah konstruksi sebagai hasil dari proses-proses sosial dengan segala kompleksitasnya dalam sebuah komunitas manusia.⁶ Oleh karena itu, seringkali pula istilah historiografi secara umum digunakan untuk menyebut hasil penelitian dan penulisan sejarah. Istilah ini bahkan digunakan untuk menyebut tulisan sejarah atau cerita sejarah yang berbentuk tulisan.

Sementara itu, kata “pembebasan” berasal dari bahasa Inggris *liberation* yang dapat dipahami sebagai “menjadi terbebas” atau perubahan dari kondisi tidak memiliki kebebasan menjadi memiliki kebebasan. Kata “pembebasan” juga seringkali digunakan untuk mengacu pada tindakan untuk menghapuskan secara paksa kekuasaan yang tidak diinginkan atas suatu wilayah, seseorang, atau kelompok masyarakat oleh kekuatan (seringkali militer) orang asing.⁷

Kata “pembebasan” yang digunakan di sini dimaksudkan sejajar dengan kata “pembebasan” yang pernah digunakan pada gerakan (sering juga disebut paham) “Teologi Pembebasan”. Gerakan Teologi Pembebasan muncul sejak akhir tahun 1960-an di kalangan gereja Katolik Roma. Gerakan

⁴ Bambang Purwanto & Asvi Warman Adam, *Menggugat Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 22-26.

⁵ B. Croce, “History and Cronicle”, dalam: Hans Meyerhoff, *The Philosophy of History in Our Time: An Anthology* (New York: Anchor Original Publisher, 1959), hlm. 44.

⁶ Gilbert J. Garraghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957), hlm. 396.

⁷ Lihat <http://en.wikipedia.org/wiki/Liberation> (Dikunjungi tanggal 20 November 2009).

yang pada awalnya berpusat di Amerika Latin ini berusaha untuk mempraktikkan kepercayaan agama dengan membantu orang miskin dan tertindas melalui keterlibatannya dalam gerakan politik dan masalah-masalah sosial. Gerakan ini berusaha meningkatkan baik kesadaran terhadap struktur sosio-ekonomi yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan sosial maupun kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam perubahan struktur yang tidak adil itu. Para penganut Teologi Pembebasan percaya bahwa Tuhan berfirman melalui si miskin, dan bahwa Injil hanya dapat dipahami jika dilihat dari perspektif si miskin. Mereka merasa bahwa gereja Katolik Roma di Amerika Latin secara fundamental berbeda dengan gereja di Eropa, yaitu bahwa gereja di Amerika Latin adalah gereja miskin dan untuk orang miskin.

Kelahiran gerakan Teologi Pembebasan ini lazim dikaitkan dengan Konferensi para Uskup Amerika Latin pada tahun 1968 di Medellin, Colombia. Dalam konferensi ini para uskup membuat dokumen mengenai hak-hak orang miskin dan membuat pernyataan bahwa negara-negara maju telah memperkaya diri sendiri dengan mengeruk keuntungan dari negara-negara dunia ketiga. Beberapa tokoh teologi pembebasan antara lain: Gustavo Gutiérrez (Peru), Oscar Arnulfo Romero (El Salvador), Leonardo Boff, Jon Sobrino, Archbishop Helder Câmara (Brasilia), dan sebagainya. Gerakan teologis ini memperoleh pendukung yang sangat kuat di Amerika Latin pada tahun 1970-an pada saat sosialisme tumbuh dengan subur di kawasan ini, yang secara ekonomi sangat miskin dan penindasan serta ketidakadilan merajalela.⁸

Bagi para penganut teologi ini, kitab Injil seharusnya tidak dipandang sekedar sebagai ayat yang diperlakukan sebagai mantra bertuah, tetapi lebih dari itu Injil harus dijadikan sebagai panduan untuk berpikir dan beraksi. Dalam hal ini surga bukan jauh di awang-awang yang hanya dapat dicapai jika telah mati, tetapi surga mestinya harus direalisasi di bumi sekarang ini. Agama seharusnya mampu membebaskan masyarakat dari berbagai belenggu dan penderitaan, seperti kemiskinan dan penindasan serta ketidakadilan di dunia ini. Dalam konteks inilah, penggunaan istilah “pembebasan” dalam konsep “historiografi pembebasan” mengacu kepada karya sejarah yang tidak sekedar sebagai pelipur lara dan pengisi waktu senggang, tetapi sebuah karya sejarah yang mampu membangkitkan kesadaran terhadap masalah aktual yang sedang dihadapi oleh masyarakat seperti kemiskinan, ketergantungan, ketidakadilan, penindasan, dan sebagainya.

Dalam konteks keindonesiaan, perpaduan antara kesadaran sejarah dan kesadaran aktual serta kesadaran futural itu pada gilirannya akan mendorong semangat masyarakat untuk melakukan suatu langkah perbaikan demi mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang makmur, berkeadilan, mandiri, bebas dari penindasan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, “historiografi pembebasan” ini akan membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk membebaskan diri dari belenggu kemiskinan, ketergantungan, ketidakadilan, penindasan dan lain-lain. Selama ini, lemahnya semangat untuk membebaskan diri dari belenggu itu semua disebabkan oleh salah pemahaman terhadap masa lampau dan masa kini, bahwa bangsa Indonesia sudah merasa merdeka, sudah merasa kecukupan, berkeadilan, bebas dari belenggu penindasan, dan sebagainya.

“Paradigma rakyat belum merdeka” barangkali dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengembangkan perspektif

⁸ Lihat <http://www.britanica.com> (Dikunjungi tanggal 15 November 2009).

“historiografi pembebasan” bagi Indonesia di masa sekarang dan masa yang akan datang.⁹ Feodalisme, kolonialisme, dan pemerintahan tirani pada masa lampau telah selalu menempatkan rakyat sebagai pihak yang terpinggirkan dalam relasi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Harus disadari, meskipun bangsa Indonesia telah berhasil mengusir kolonialis dan memproklamasikan kemerdekaan namun belum berarti mereka telah merdeka secara hakiki dalam hal pemenuhan hak-haknya untuk merdeka memperoleh keadilan dan kehidupan yang layak. Penjajahan dan eksploitasi dapat dilakukan tidak hanya oleh para penjajah asing (kolonialis), tetapi dapat juga dilakukan oleh sesama anak bangsa ini sebagaimana wacana yang dikembangkan oleh pendekatan pascakolonialisme.¹⁰ Dalam konteks pengawalan proses pembentukan masyarakat Indonesia yang madani sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945 inilah, kiranya “historiografi pembebasan” dapat bertindak sebagai kritik sosial yang aktual. Nilai inilah yang mungkin dapat dijadikan ukuran bagi “historiografi pembebasan” untuk dapat bertindak sebagai kritikus sosial. Dengan demikian, “historiografi pembebasan” ini lebih banyak menyangkut upaya pemikiran agar historiografi memiliki fungsi yang signifikan dalam ikut memecahkan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia pada saat ini dan mendatang.

Landasan Historiografi Pembebasan

Seperti diketahui bahwa munculnya wacana penulisan sejarah yang bercorak keindonesiaan atau

populer dengan sebutan Indonesiasentris muncul sebagai bentuk respon terhadap dominasi warisan penulisan sejarah Indonesia (ataupun sejarah Hindia Belanda) yang bersifat Neerlandosentris (berpusat pada orang Belanda) yang memang ditulis oleh para sejarawan Belanda.¹¹ Sudah barang tentu, fenomena Neerlandosentris ini dapat dipahami sebab mereka menulis sejarah itu dipengaruhi oleh pandangan hidup dan perspektif serta kepentingan mereka sendiri. Tidak mengherankan jika historiografi yang mereka hasilkan untuk periode kehadiran mereka di Hindia Belanda (abad XVI hingga XX) juga menempatkan orang-orang Belanda sebagai *dramatisch persoon*, sedangkan orang-orang pribumi sebagai “peran pembantu” atau bahkan sebagai peran yang antagonistik. Perlawanan kaum pribumi terhadap dominasi kolonial diposisikan sebagai pemberontak, sedangkan orang-orang Belanda yang berhasil menumpas perlawanan pribumi dipuja sebagai pahlawan. Gerakan-gerakan resisten melawan orde kolonial dipandang sebagai gerakan kaum ekstremis dari *inlanders*.

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 tentu telah mendorong para sejarawan Indonesia melakukan “dekolonisasi” terhadap historiografi kolonial yang bercorak Neerlandosentris. Sejarawan ingin menempatkan orang pribumi sebagai pemeran utama dalam panggung sejarah Indonesia, sedangkan orang-orang Belanda sebagai peran pembantu. Apa yang dipandang pemberontak kemudian diposisikan sebagai pahlawan atau sebaliknya. Dengan demikian, lahirlah “sejarah nasionalistis”, yaitu tipe tulisan sejarah yang lebih menonjolkan semangat nasionalisme yang merupakan antitesis dari kolonialisme sehingga seringkali bersifat anakronistik dan *over interpretative*.

Historiografi Indonesiasentris yang

⁹ Istilah ini diambil dari ungkapan Rendra yang berbicara tentang keterjajahan budaya Indonesia. Lihat W.S. Rendra, *Rakyat belum Merdeka: Sebuah Paradigma Budaya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).

¹⁰ Ania Loomba, *Kolonialisme/ Pascakolonialisme* (Yogyakarta: Benteng, 2003), hlm. 22-23.

¹¹ Sejarah Indonesia ataupun Sejarah Hindia Belanda yang bersifat Neerlandosentris merupakan Sejarah Hindia Belanda atau sejarah Indonesia yang menggunakan perspektif dan moralitas Belanda.

menghasilkan sejarah nasionalistis selama periode perang kemerdekaan dan tahun 1950-an ini dapat dipahami mengingat situasi zaman pada waktu itu memang menuntut hal yang demikian. Sebagai negara-bangsa baru, Indonesia membutuhkan legitimasi dan semangat nasionalisme yang bersumber dari perkembangan sejarah dan budaya dalam rangka untuk menghadapi kolonialisme Belanda yang belum sepenuhnya mau hengkang dari Indonesia. Artinya, merupakan sesuatu yang wajar bahwa sejarah ditulis untuk kepentingan zamannya.

Ketika ancaman kolonial Belanda semakin lemah sejalan dengan perkembangan kematangan intelektual dari para sejarawan Indonesia, perspektif Indonesiasentris disempurnakan dengan metodologi sejarah kritis sehingga Indonesiasentrisme tidak mengorbankan kebenaran fakta sejarah. Untuk memberikan bobot ilmiah dari Indonesiasentrisme, Sartono Kartodirdjo misalnya, telah memelopori pendekatan ilmu sosial dalam historiografi Indonesiasentris.¹²

Persoalan segera muncul, sebagaimana yang dikatakan oleh Bambang Purwanto bahwa wacana historiografi Indonesiasentris mengalami "jumud" atau kemandegan ketika generasi sejarawan pasca Sartono belum berhasil mengembangkan kepioniran yang telah dirintis oleh Sartono. Bambang Purwanto mengatakan bahwa historiografi Indonesiasentris akhirnya terjebak pada kubangan yang sebetulnya secara substantif sama dengan historiografi kolonial. Hanya titik pandangannya saja yang berubah 180 derajat. Bahkan, karena semangat nasionalisme yang begitu menggelora sehingga muncul anakronisme yang berlebihan dalam menggambarkan periode kolonial. Sementara itu, bayang-bayang sejarah

struktural juga telah membelenggu sejarawan-sejarawan muda Indonesia untuk tidak lagi mengembangkan dan menganekaragamkan epistemologi dalam pengkajian sejarah.¹³

Kini zaman telah berubah. Nasionalisme tidak semata-mata dimaknai secara romantis sebagai antitesis dari kolonialisme. Berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi sekarang, dan mungkin yang akan datang membutuhkan "nasionalisme yang berbeda". Romantisme perjuangan melawan penjajah barangkali bukan lagi merupakan faktor terpenting untuk mempertahankan integrasi bangsa Indonesia. Demokrasi, keadilan, dan kemakmuran barangkali merupakan kebanggaan yang mampu mengikat keindonesiaan. Dulu mungkin semua daerah merasa senasib sebagai koloni Belanda, tetapi sekarang tidak merasa senasib lagi karena ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Barangkali dalam kerangka berpikir yang semacam inilah GAM (Gerakan Aceh Merdeka) misalnya, ingin melepaskan Aceh dari NKRI, padahal pada awal kemerdekaan, Aceh merupakan daerah yang sangat mendukung kemerdekaan RI. Mungkin justru perubahan semangat kebangsaan inilah yang gagal ditangkap oleh para pemimpin Indonesia, termasuk sejarawan. Mereka gagal dalam menjelaskan perubahan perspektif nasionalisme dalam masyarakat Indonesia.

Dalam konteks itu, mestinya pendekatan Indonesiasentris memang hanya cocok untuk mengkaji sejarah Indonesia periode prakemerdekaan. Tentunya untuk mengkaji sejarah Indonesia setelah periode pascakemerdekaan tidak perlu pendekatan Indonesiasentris, karena semua *dramatisch person* adalah orang-orang Indonesia sendiri, kecuali kalau kita merasa bahwa neokolonialisme seperti kata Bung Karno masih hadir di Indonesia. Bahkan simptom disorientasi ini tidak hanya dialami oleh sejarawan Indonesia, tetapi sudah mewabah pada para pemimpin Indonesia yang tidak

¹² Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: Gramedia, 1982).

¹³ Purwanto, *Gagalnya Historiografi*, hlm. 46.

lagi memiliki orientasi yang jelas mau dibawa ke mana negeri tercinta ini.

Lalu, perspektif apa yang diperlukan untuk mengkaji sejarah Indonesia sehingga menghasilkan “historiografi pembebasan” yang memiliki kemanfaatan dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini? Dalam hal ini, ajakan Bambang Purwanto untuk mengembangkan kesadaran dekonstruktif dalam historiografi guna mendobrak kebekuan dan disorientasi historiografi Indonesia saat ini adalah sangat penting. Sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Jacques Derrida, seorang pemikir pascastrukturalis bahwa “semua teks harus selalu dipertanyakan kebenarannya” karena sesungguhnya membaca teks secara kritis merupakan permulaan penemuan kebenaran sejarah.¹⁴ Dalam hal ini, karya historiografi yang ada juga harus dipandang sebagai teks yang harus diragukan kebenarannya dan kalau perlu dibongkar kembali. Dengan demikian penulisan kembali sejarah (*rewriting history*) merupakan suatu keniscayaan, bukan barang tabu yang dapat dipaksakan secara politis.

Kesadaran dekonstruktif semacam itu memang tidak mudah dilakukan, bahkan termasuk untuk para kandidat doktor. Kebanyakan para kandidat doktor sejarah memperlakukan karya-karya penulis sebelumnya yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka hampir selalu ditempatkan sebagai “bahan acuan” atau sekedar sebagai sebuah informasi, bukan sebagai teks yang harus dikritik dan diragukan kebenarannya. Perlakuan yang sama juga diberikan kepada sumber-sumber dan teks-teks yang yang semestinya harus disikapi secara kritis.¹⁵

Akibatnya, “wacana dekonstruktif” kurang muncul dalam naskah disertasi. Hal ini juga berarti bahwa karya disertasi itu tidak menjadi bagian dari sebuah dialog ilmiah yang panjang dari tema yang dibahasnya. Munculnya sebuah disertasi seolah-olah merupakan “spesies baru” yang tidak memiliki genealogi dengan “spesies” yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, kajian-kajian mengenai tema-tema sejarah kurang mengalami *progress*. Mereka hanya bergulat dengan diri sendiri sehingga kurang menghasilkan “spesies” yang semakin berkualitas.

Untuk dapat melakukan dekonstruksi terhadap historiografi yang ada yang lebih banyak berfungsi sebagai pelipur lara dan hanya menina-bobokan sebagian besar masyarakat Indonesia yang sedang menjerit menghadapi situasi sulit, “historiografi pembebasan” harus berani menempatkan kondisi aktual dan kontekstual sebagai *point of departure*. Hanya dengan cara itu, karya historiografi memiliki hubungan yang erat dengan persoalan kekinian. Kembali harus diingat ucapan Croce bahwa historiografi merupakan *contemporary thought about the past*. Dalam hubungan itu, penelitian sejarah tidak harus hanya menggunakan metodologi dan epistemologi yang digunakan dalam paradigma positivisme yang memperlakukan sumber-sumber sejarah secara eksak dan kuantitatif dan dianggap “dapat berbicara sendiri” sebagaimana yang terjadi dalam ilmu alam.

Metodologi positivis berakar pada pemikiran teoritis Comte dan Durkheim yang memandang fakta sosial sebagai keadaan objektif yang terlepas bahkan berada di luar keadaan subjektif individu, tetapi berpengaruh dan memaksakan pengaruh dari luar. Dalam hal ini, mereka sangat percaya pada kriteria *rigor*, yaitu kesahihan eksternal dan internal, keandalan

¹⁴ Ia mengatakan bahwa “*deconstruction is an attempt to open a text (literary, philosophical, or otherwise) to several meanings and interpretations*”, lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida#Deconstruction (Dikunjungi tanggal 10 Desember 2009).

¹⁵ Hal ini dapat dilihat antara lain dalam naskah ujian disertasi yang ditulis oleh Anatona di Universitas Gadjah Mada. Ia mengutip tulisan Martin A. Klein mengenai sejarah perbudakan di Asia dan Afrika, bahwa: “Sultan Mahmud Syah yang berkuasa dari tahun 1488 hingga 1511, dalam pemerintahannya dikelilingi oleh para perempuan yang sebagian di antara mereka dijadikan sebagai gundik

dan obyektivitas. Metodologi ini sangat berpengaruh terhadap penelitian sejarah sejak abad ke-19 dengan tokoh utama Leopold von Ranke yang ingin menulis sejarah “*as it actually happened*”. Seleksi yang sangat ketat diberlakukan untuk sumber sejarah, sehingga hanya sumber tertulis saja yang dapat digunakan. Dalam konteks itu, muncul pomeo bahwa: “*no (written) document, no history*”.

Untuk dapat mengembangkan ‘historiografi pembebasan’ tentu saja tidak cukup hanya menggunakan paradigma positivis, tetapi juga perlu menerapkan paradigma lain yang juga digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini, paradigma teori kritis sangat bermanfaat untuk itu. Secara umum teori kritis dalam konteks ilmu sosial dapat didefinisikan sebagai suatu proses kritis untuk mendorong kesadaran orang agar memiliki kemampuan untuk “menghadapi” kondisi struktural yang mendominasi, menekan bahkan mengeksploitasi. Untuk itu, pendekatan teori kritis tampak jelas mempunyai komitmen yang tinggi pada terbangunnya tata kehidupan sosial yang setara (*equal*), berkeadilan dalam arti terbebas (misi pembebasan) dari suatu sistem yang mendominasi/diskriminatif, represif dan eksploitatif. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa ilmu sosial mestinya tidak hanya sekedar

memberi pemahaman atas ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan distribusi *resources*, tetapi seharusnya berusaha untuk ikut membantu menciptakan kesetaraan dan kemajuan (emansipasi) dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, teori kritis tampaknya juga memiliki keterikatan moral untuk mengkritik *status quo* dan membangun kehidupan sosial masyarakat yang lebih berkeadilan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Jean Paul Sartre bahwa: “*...the duty of the intellectual is to denounce injustices and abuses of power, and to fight for truth, justice, progress, and other universal values...*”.¹⁶

Sejalan dengan paradigma teori kritis dalam studi sosiologi, “historiografi pembebasan” juga memiliki perhatian utama untuk membebaskan pikiran masyarakat dari kungkungan mitos, ketidaktahuan, dan manipulasi masa lampau yang menyebabkan kesalahan dalam memahami kondisi sekarang dan masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, “historiografi pembebasan” memiliki misi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan-persoalan aktual yang mereka hadapi sehingga memberikan inspirasi untuk melakukan suatu perbaikan demi mencapai masa depan yang gemilang. Persoalan-persoalan aktual yang dapat

atau perempuan simpanan” (halaman 331). Selanjutnya ia menulis: “Pada awal abad ke-17, seorang Sultan (Aceh) memiliki lebih dari 300 orang gundik. Gundik-gundik didapatkan dari daerah-daerah yang ditaklukkan Aceh. Setelah Sultan tidak lagi memakai mereka, gundik-gundik tersebut diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain” (halaman 332). Dalam hal ini, Anatona tidak membedakan antara konsep gundik (*concubine*) dengan budak (*slave*) di dalam Islam (karena Sultan Malaka dan Aceh beragama Islam). Gundik atau wanita simpanan merupakan “orang merdeka” yang berbeda dengan wanita budak yang berstatus “tidak merdeka”. Hubungan seksual laki-laki dengan wanita gundik merupakan perzinahan dan dilarang oleh Islam, sedangkan hubungan seksual antara laki-laki dengan budak perempuan miliknya diperbolehkan sebagaimana yang tertera dalam Al Quran Surat Al Mukminun Ayat 1-7. Jadi sejauh para Sultan itu betul-betul memiliki budak perempuan (karena waktu itu perbudakan masih merupakan istitusi yang legal) maka hal itu syah adanya baik secara syariat maupun konteks tradisi. Jadi sikap dekonstruktif yang diuraikan pada bagian pendahuluan dari disertasi belum sepenuhnya diterapkan dalam bagian analisisnya. Lihat Anatona, “Perbudakan dan Perdagangan Budak di Kawasan Selat malaka, 1786-1880-an” (naskah ujian disertasi pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2006).

¹⁶ Lihat misalnya R. Morrow, *Critical Theory and Methodology* (Newbury Park, Calif: Sage, 1994). Lihat juga W.L. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Boston: Allyn & Bacon, 1994).

dianalisis secara historis antara lain menyangkut kemiskinan, ketidakadilan, dominasi, eksploitasi, diskriminasi (ras, gender, kepercayaan, dan sebagainya), manipulasi, represi birokrasi dan sebagainya. Hanya dengan penyadaran semacam itu masyarakat Indonesia akan meyakini dan kemudian tergerak untuk melakukan *action*. Dengan demikian sejalan dengan apa yang dikatakan Sartre tersebut di atas, “historiografi pembebasan” juga dimaksudkan untuk ambil bagian dalam memerangi ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, perjuangan untuk kebenaran, keadilan, kemajuan, dan hak asasi manusia melalui misi penyadaran dengan tulisan sejarah.

Sebagai respon terhadap ketidakbermanfaatan historiografi yang selama ini berkembang, “historiografi pembebasan” lebih berorientasi untuk menyoroti persoalan-persoalan ketidakadilan dan eksploitasi yang bersifat aktual dalam masyarakat yang seringkali justru dilanggengkan oleh para penulis sejarah.¹⁷ Dengan cara demikian, “historiografi pembebasan” akan dapat membantu masyarakat untuk menemukan jalan keluar yang mendasar guna memecahkan persoalan masyarakat dan bangsa untuk menuju kejayaannya di masa depan.

Sejarah Sosial dan “Historiografi Pembebasan”

Entah karena latah atau karena ingin bersikap populis atau memang betul-betul ingin menunjukkan peran orang kebanyakan (*common people*) dalam panggung sejarah yang pada umumnya didominasi oleh kaum elite, akhir-akhir ini banyak sejarawan yang ingin menonjolkan peran orang

kebanyakan dalam historiografi. Oleh para sejarawan, corak penulisan sejarah yang menonjolkan orang kebanyakan ini sering juga disebut sebagai *history from below*.¹⁸ Corak penulisan yang seperti ini berkaitan dengan soal fokus dan perspektif. Dalam hubungan ini, ada persoalan perspektif dalam penulisan sejarah Indonesia periode kemerdekaan. Jika perspektif Indonesiasentris kurang diperlukan lagi dalam mengkaji sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, karena semua pelaku sejarah di Indonesia semuanya adalah orang Indonesia, lalu perspektif apa yang diperlukan? Memang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu. Perlunya perspektif Indonesiasentris dalam mengkaji sejarah Indonesia periode kolonial jelas sangat diperlukan untuk menampilkan peran orang Indonesia dalam panggung sejarah Indonesia sendiri. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan tersebut tergantung dari komitmen kebangsaan para sejarawan Indonesia itu sendiri.

Sudah terbukti bahwa nasionalisme romantis yang menekankan kepada perjuangan melawan kolonialisme sudah sulit untuk dipertahankan sebagai sarana utama untuk menjaga integrasi bangsa Indonesia.¹⁹ Apalagi para pejuang dan orang-orang yang memiliki pengalaman langsung berhadapan dengan kolonialisme sudah mulai menghilang satu per satu. Jika disepakati bahwa nilai-nilai demokrasi, masyarakat madani, kesejahteraan sosial, dan keadilan menjadi cita-cita Indonesia di masa yang akan datang, maka “perspektif kerakyatan” seyogyanya mewarnai pendekatan “historiografi pembebasan”. Namun demikian, baik kaum elite maupun orang kebanyakan juga bagian dari rakyat Indonesia, sehingga membedakan satu kelompok dengan yang lainnya sesungguhnya tidak *fair*. “Sejarah orang

¹⁷ Lihat misalnya Budiawan, *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto* (Jakarta: ELSAM, 2004).

¹⁸ Jim Sharpe, “History from Bellow”, dalam: Peter Burke, *New Perspectives on Historical Writing* (Cornwall: Polity Press, 1991), hlm. 24-41.

¹⁹ Sartono Kartodirdjo, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 32-59.

kebanyakan” yang memiliki kecenderungan mengontradiksikan rakyat dan negara, elite dan orang kebanyakan, si kaya dan si miskin harus ditinjau kembali. Penggambaran “sejarah orang kebanyakan” dalam kehidupan sehari-hari tanpa dapat menangkap semangat perjuangan mereka dalam mencari kemakmuran dan keadilan juga perlu ditinjau kembali. Oleh karena penindasan dan ketidakadilan tidak hanya terjadi di kalangan orang kebanyakan, maka objek kajian “historiografi pembebasan” tidak hanya istimewa pada sejarah orang kebanyakan atau sebaliknya sejarah kaum elite saja. Apa yang lebih menjadi titik tekan adalah fenomena historis yang saat ini telah memprekondisikan terjadinya persoalan kemiskinan, ketergantungan, kemelaratan, penindasan, ketidakadilan yang dapat dialami oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat baik dari kalangan rakyat biasa maupun dari kalangan elite itu sendiri.²⁰

Dalam konteks itu, “historiografi pembebasan” perlu membangkitkan kesadaran kepada masyarakat pembaca tentang persoalan yang sedang dihadapi dan masa depan yang akan diraih bersama sebagai komunitas bangsa. Historiografi Indonesia semestinya mampu menjawab pertanyaan berikut ini dengan uraian historis: Mengapa semua terjadi seperti sekarang ini? Mengapa Indonesia masih tergantung kepada negara lain? Mengapa hutang Indonesia semakin menumpuk? Mengapa kemiskinan semakin akut? Mengapa pemerataan kemakmuran sulit dicapai? Dengan beban yang seperti itu:

Mengapa kebanyakan masyarakat Indonesia masih tidak menyadari dan bahkan masih membanggakan diri sebagai bangsa merdeka ketika kemiskinan, ketidakadilan, ketergantungan menjadi semakin parah? Pertanyaan-pertanyaan itu dapat diperinci lagi dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail mengenai kondisi aktual bangsa Indonesia yang kemudian dijawab dalam penelitian sejarah.

Dengan demikian, “historiografi pembebasan” perlu memiliki *point of departure* dari persoalan kekinian karena sesungguhnya historiografi adalah “*contemporary thought about the past*” sebagaimana yang diungkapkan oleh filsuf idealis Italia Benedetto Croce.²¹ Dalam hal ini, historiografi Indonesia semestinya mampu menjadi pelita kegelapan masyarakat dalam memahami masa kini. Historiografi hendaknya dapat menjawab pertanyaan mengapa semua terjadi seperti sekarang ini. Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan membangkitkan kesadaran masyarakat tentang persoalan aktual yang bersumber dari masa lampau yang seobjektif mungkin, yang pada gilirannya dapat membangkitkan semangat untuk mengubah kondisi saat ini guna mencapai kejayaan masa depan Indonesia tercinta ini.

Pertanyaan kunci adalah: Apakah selama ini historiografi Indonesia tidak berkembang? Justru sebaliknya, tulisan sejarah Indonesia berkembang pesat terutama setelah memasuki masa reformasi. Sementara pihak mensinyalir telah terjadi overproduksi dalam historiografi Indonesia²² sebagaimana gejala yang sama telah terjadi dalam historiografi Barat pada abad lalu.²³

²⁰ Dalam hal ini perlu disebut karya Sartono Kartodirdjo mengenai petani Banten. Karya ini memberikan kesadaran bagaimana petani yang merupakan kelompok sosial yang marginal selalu berjuang untuk membebaskan diri dari ketidakadilan dan penindasan. Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984).

²¹ Garraghan, *A Guide to Historical Method*, hlm. 21.

²² Slamet Subekti, “Bagaimana Menyikapi Overproduksi Historiografi dalam Era Postmodern: Pembelajaran dari Perspektif F.R. Ankersmit untuk Proyeksi Diri Keindonesiaan”, makalah disampaikan pada *Konferensi Nasional Sejarah VIII* (Jakarta: 14-17 Nopember 2006).

²³ F.R. Ankersmit, *History and Tropology: The Rise and Fall of Metaphor* (Los Angeles: University of California Press, 1994), hlm. 162.

Namun demikian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Purwanto bahwa historiografi yang menjamur itu tidak diiringi dengan upaya tertentu sehingga historiografi itu dinilai tidak memiliki kontribusi apa-apa terhadap masyarakat. Dalam hal ini, pertanyaan mendasar harus diajukan sesuai dengan kepentingan masa kini. Masa lampau bukan untuk masa lampau itu sendiri, tetapi untuk masa kini. Dalam kaitan kondisi Indonesia saat ini, upaya dekonstruksi harus dilakukan terhadap historiografi Indonesia modern saat ini. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa selama ini ilmu tidak pernah dapat menciptakan sebuah konsensus yang mapan dan bergantung kepada dinamika yang berada di luar dirinya.²⁴

Para sejarawan Indonesia selama ini dalam menggambarkan periode perang kemerdekaan, misalnya, lebih memberikan penilaian “positif” terhadap “nilai kemanusiaan” dari strategi diplomasi dan konsesi ekonomi serta politik yang diberikan kepada bangsa asing yang hingga sekarang ini menjadi sumber ketergantungan Indonesia. Sementara itu, kekuatan-kekuatan rakyat yang menginginkan kemerdekaan 100% dipandang sebagai ekstremis. Pandangan semacam itu, sama persis dengan yang dimiliki oleh kolonialis Belanda. Celaknya hampir semua orang Indonesia juga berpandangan seperti itu, karena guru-guru sejarah juga mengajar para muridnya seperti itu. Demikian juga upaya-upaya pemerintah yang berusaha untuk menegakkan ekonomi berdikari digambarkan oleh banyak sejarawan, juga sebagian besar bangsa Indonesia, sebagai rezim yang konservatif dan diberi stigma sebagai pemerintahan yang dipengaruhi oleh komunisme. Sekarang banyak orang

baru menyadari bahwa strategi pembangunan yang kapitalistik justru telah menjerumuskan Indonesia dalam jurang ketergantungan dan keterpurukan. Demikian juga, diplomasi dan konsesi yang diberikan kepada kekuatan penjajah juga telah menempatkan politik Indonesia pada posisi lemah dalam pergaulan internasional.

Pertanyaan yang lebih detail juga dapat diajukan untuk masalah-masalah aktual lain yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, seperti: kemiskinan, ketidakadilan yang masih merajalela, eksploitasi, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, birokrasi, gender, dan sebagainya. Jika hal itu dilakukan oleh para sejarawan Indonesia, maka “historiografi pembebasan” betul-betul akan dapat membebaskan pikiran masyarakat dari kungkungan mitos, ketidaktahuan, salah tafsir, manipulasi, dan sebagainya terhadap masa lampau, yang pada gilirannya sangat menentukan cara pandang masyarakat terhadap persoalan masa kini dan harapan masa depan.

Sejarah Nasional dan Sejarah Indonesia sebagai “Historiografi Pembebasan”

Sejalan dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru, runtuh pula “kewibawaan” Sejarah Nasional. Sebagian sejarawan sudah tidak mau lagi mengembangkan jenis sejarah ini.²⁵ Hal ini dapat terjadi karena “kedekatan” sejarah nasional dengan “penyalahgunaan sejarah” untuk kepentingan rezim yang sedang berkuasa. Ada upaya dari pemerintah untuk menggunakan Sejarah Nasional sebagai alat legitimasi kekuasaan. Seperti diketahui bahwa setelah penerbitannya sejak pertengahan tahun 1970-an, Sejarah Nasional yang terdiri dari enam jilid dijadikan sebagai “buku babon” dari pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah.

²⁴ Lihat Hans Kung, *Etika Ekonomi dan Politik Global: Mencari Visi Baru bagi Kelangsungan Agama di Abad XXI* (Yogyakarta: Qalam, 2002), hlm. 160. Lihat juga Subekti, “Bagaimana Menyikapi Overproduksi”, hlm. 6.

²⁵ Sebuah tim yang dibentuk pada masa reformasi yang diketuai oleh Prof. Dr. Taufik Abdullah yang anggotanya terdiri dari para sejarawan dari berbagai perguruan tinggi dan berbagai instansi di Indonesia yang diberi tugas untuk melakukan penulisan sejarah Indonesia dari perspektif reformasi lebih senang memberi label sebagai “Sejarah Indonesia” daripada “Sejarah Nasional”.

Dengan demikian, seringkali Sejarah Nasional diidentikkan dengan kepentingan politik penguasa. Oleh karena itu, dapat dipahami jika “kewibawaan” Sejarah Nasional mengalami keruntuhan ketika rezim Orde Baru *lengser* dari panggung politik Indonesia.

Pentingnya kedudukan Sejarah Nasional dengan perspektif Indonesiasentris dalam konteks keindonesiaan perlu dipahami dalam kaitannya dengan situasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ketika konsep Sejarah Nasional itu lahir pada tahun 1950-an. Tahun-tahun 1950-an telah memberikan pengalaman-pengalaman baru kepada segenap elemen bangsa Indonesia dalam kehidupan bersama sebagai sebuah *nation*: perang kemerdekaan melawan tentara Sekutu dan Belanda, jatuh-bangunnya NKRI, berbagai konflik daerah dan gerakan separatisme, serta pemberontakan, keterlibatan Belanda dalam pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan), keterlibatan Amerika dalam Pemberontakan PRRI/PERMESTA, penguasaan Irian Barat oleh Belanda, dan sebagainya. Semua itu telah menempa semangat nasionalisme yang tinggi di kalangan bangsa Indonesia termasuk para sejarawan. Dalam hubungan ini dapat dipahami jika semangat dekolonisasi historiografi sangat mewarnai Seminar Sejarah Nasional I yang diselenggarakan di penghujung tahun 1957.

Dalam seminar itu hampir semua peserta mencurahkan perhatiannya untuk merumuskan landasan filosofis dan metodologis sejarah Indonesia. Pada waktu itu dirasakan betapa pentingnya mencari dan meneguhkan identitas bangsa Indonesia yang berasal dari kajian sejarah. Sejarawan Sartono Kartodirdjo menggagas konsep Sejarah Nasional yang akan menggambarkan pasang-surut proses formasi *nation* Indonesia. Memang

nation Indonesia merupakan realitas baru, namun tidak muncul secara tiba-tiba pada awal abad XX atau bahkan baru pada tahun 1945. “Proses menjadi Indonesia” itu sudah berlangsung berabad-abad yang lalu. Menurut Sartono, “*network*” merupakan elemen penting dalam proses formasi nasion Indonesia. Ia mengatakan:²⁶

“Sejarah Nasional Indonesia sesungguhnya dapat dipandang sebagai proses perkembangan yang secara lambat laun dan kontinu mewujudkan integrasi, sejak zaman prasejarah sampai masa kini yang akhirnya menghasilkan bentuk integrasi seperti terwujud pada kesatuan nasional dewasa ini.”

Oleh karena itu, perspektif Indonesiasentris sangat diperlukan dalam menulis Sejarah Nasional agar peran elemen-elemen sosio-kultural yang kemudian menjadi *nation* Indonesia dapat diungkapkan. Jadi pada tahun 1950-an itu historiografi Indonesia sudah menjalankan fungsinya untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah aktual yang sedang dihadapi bangsa Indonesia terutama dalam pencarian identitas sebagai sebuah *nation* baru yang sangat plural secara kultural. Persoalan identitas kultural ini sebetulnya tidak hanya dihadapi oleh sejarawan Indonesia saja tetapi secara umum juga dihadapi oleh sejarawan di Asia Tenggara.²⁷ Apa yang menjadi pertanyaan adalah: Apakah sudah saatnya “Sejarah Nasional” dicampakkan begitu saja? Apakah hanya karena campur tangan pemerintah Orde Baru terhadap Sejarah Nasional kemudian jenis sejarah ini dihapus begitu saja? Apakah bangsa Indonesia tidak memerlukan Sejarah Nasional lagi? Apakah semestinya Sejarah Nasional masih diperlukan dengan perubahan-perubahan pada aspek metodologis? Pendek kata, sederet pertanyaan dapat diajukan di sini. Jika diingat bahwa Sejarah Nasional merupakan sejarah yang menggambarkan perkembangan ke arah integrasi Indonesia, maka

²⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium I* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. xiii-xxiii.

²⁷ Lihat Geoffrey Barraclough, *Main Trends in History* (New York-London: Holmes & Meier, 1991), hlm. 130.

sesungguhnya Sejarah Nasional itu masih diperlukan.²⁸ Hal ini terkait erat dengan kenyataan bahwa integrasi bangsa merupakan konsep yang dinamis. Integrasi nasional sebuah bangsa dapat mengalami kehancuran jika segenap elemen sebuah bangsa tidak memiliki komitmen lagi untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Kehancuran Uni Soviet dan Yugoslavia telah memberikan pelajaran berharga mengenai integrasi nasional. Selama persatuan Indonesia masih didambakan oleh bangsa Indonesia maka selama itu pula Sejarah Nasional masih signifikan. Hal ini pernah diingatkan oleh sejarawan R. Mohammad Ali bahwa Sejarah Nasional memiliki fungsi untuk meningkatkan kesatuan dan mentalitas nasional.²⁹

Kedudukan Sejarah Nasional sebagai refleksi pengalaman bersama (*common experience*) sangat penting karena dari sejarah ini lah akar budaya, politik, dan struktur ekonomi dari suatu bangsa dapat ditemukan.³⁰ Apalagi jika diingat bahwa integrasi nasional Indonesia masih menghadapi tantangan yang berat mengingat selalu saja ada keinginan kelompok berbagai untuk memisahkan diri dari NKRI. Memang harus diakui bahwa nasion Indonesia merupakan realitas baru, namun realitas itu tidak datang begitu saja dari langit, tetapi melalui proses historis yang panjang yang mencerminkan *cross-cultural communication* di antara berbagai elemen yang kemudian membentuk nasion Indonesia (*a process to be Indonesia*).³¹ Dengan demikian, Sejarah

Nasional tidak perlu disingkirkan hanya karena kontaminasi kepentingan politik Orde Baru. Dengan perpektif baru dan pendekatan baru, Sejarah Nasional dapat dikembangkan untuk memupuk persatuan dan nasionalisme yang berlandaskan pada dialog, keadilan dan kesejahteraan. Mengingat begitu kompleksnya latar belakang sosial dan etnisitas masyarakat Indonesia, maka perspektif *cultural relativism* atau relativisme budaya merupakan salah satu alternatif dalam menulis sejarah nasional agar memiliki daya integratif dan dapat mengurangi prasangka etnik (*ethnic prejudice*). Prasangka etnik dalam historiografi itu kadang-kadang muncul, misalnya tentang sinyalemen adanya historiografi Indonesia yang masih bersifat Jawa sentris.³²

Jika dalam penyusunan sebuah sejarah nasional tidak semua fakta memiliki nilai, namun hanya fakta-fakta yang merajut benang merah keindonesiaan saja yang berguna, maka Sejarah Indonesia memberikan ruang yang luas kepada fakta-fakta sejarah yang terjadi di ruang yang kemudian menjadi wilayah Indonesia. Sejarah Indonesia tidak hanya dapat mencakup segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya dengan cakupan periode yang tidak terbatas, tetapi juga dapat mencakup sejarah berbagai daerah yang termasuk dalam wilayah negara Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apa yang disebut sebagai sejarah lokal sebetulnya juga merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Harus dicatat bahwa Sejarah Nasional bukan merupakan

²⁸ Sartono Kartodirdjo, *Sejak Indische sampai Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 106-112.

²⁹ Lihat H.A.J. Klooster, *Bangsa Indonesia Menulis Sejarahnya Sendiri*. Draf terjemahan oleh Suhardi (1992), hlm. 191.

³⁰ Christine Drake, *National Integration in Indonesia: Patterns and Policies* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1989), hlm. 16.

³¹ Singgih Tri Sulistyono, “Writing of Indonesian Maritime History and National Integration in the Era of Regional Autonomy”, paper disampaikan pada *The 2nd International Conference on Indonesia: Democratic Transition and Structural Reformation* (Universitas Diponegoro Semarang, 7-8 Juli 2004), hlm. 6-7.

³² Singgih Tri Sulistyono, “Sejarah Maritim Nusantara: Perkembangan dan Prospeknya”, makalah dipresentasikan pada *Seminar Arkeologi Maritim* yang diselenggarakan oleh Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

penjumlahan dari sejarah lokal-sejarah lokal yang berserakan di sana-sini. Proses formasi *nation* Indonesia menjadi titik tekan utama sejarah nasional.³³ Dalam konteks ini, semangat “historiografi pembebasan” dapat diterapkan baik dalam sejarah Indonesia maupun Sejarah Nasional.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa garis penting:

1. Terdapat banyak sinyalemen yang mengatakan historiografi Indonesia telah tidak mampu menunaikan fungsinya dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Padahal, pada saat ini masyarakat Indonesia sedang menghadapi berbagai macam persoalan seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketergantungan, eksploitasi, dan sebagainya menyusul terjadinya badai krisis ekonomi sejak tahun 1998.

2. Ketidakmampuan historiografi Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam memecahkan persoalan bangsa di samping disebabkan oleh keterbelengguan pada formalisme metodologi dan epistemologi, juga disebabkan oleh kekurangberanian sejarawan untuk menggugat realitas kekinian. Dalam hal inilah, “historiografi pembebasan” dapat dijadikan sebagai sebuah alternatif historiografi yang akan mampu membebaskan pikiran

3. masyarakat dari belenggu mitos kelampauan sehingga memiliki kesadaran terhadap penyelesaian persoalan kekinian dan cita-cita di masa depan. Untuk itu, kajian “historiografi pembebasan” lebih menekankan kepada persoalan-persoalan kontemporer yang sedang menghimpit masyarakat Indonesia saat ini seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketergantungan, dan sebagainya yang sudah diterima sebagai sebuah keniscayaan. Dengan demikian, kajian “historiografi pembebasan” akan menggunakan *point of departure* kekinian untuk mengkaji masa lampau sehingga kajian sejarah tidak tercerabut dengan akar kepentingan masa kini. Dalam hubungan itu, “historiografi pembebasan” mengedepankan komitmen kepada nilai-nilai keindonesiaan dengan dasar kemanusiaan, yaitu kembali kepada cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Penekanan kajian dalam “historiografi pembebasan” tidak hanya dikhususkan bagi sejarah orang kebanyakan, tetapi juga kepada kelompok sosial apa saja sebab eksploitasi dan ketidakadilan serta berbagai persoalan serupa terjadi di segala lini masyarakat. Apa yang lebih penting adalah mendekonstruksi wacana historis yang ada yang tidak sesuai dengan semangat untuk membebaskan masyarakat dari belenggu persoalan yang mereka hadapi. Dengan cara demikian, “historiografi pembebasan” akan dapat membantu masyarakat untuk menemukan jalan keluar yang mendasar guna memecahkan persoalan masyarakat dan bangsa menuju kejayaannya

Universitas Indonesia (Jakarta: 15 Januari 2008). Relativisme budaya merupakan prinsip di mana kepercayaan dan tindakan seseorang harus diinterpretasikan dalam kerangka kebudayaannya sendiri serta memiliki keterbatasan dalam dimensi waktu dan tempat. Prinsip relativisme budaya juga mencakup pendirian bahwa kepercayaan dan tingkah laku masyarakat hanya dapat dipahami dalam konteks sejarah dan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Seringkali konsep ini juga mencakup pendirian tentang *truth relativism* atau relativisme kebenaran yang merupakan prinsip ketiadaan kebenaran yang mutlak, yaitu bahwa kebenaran itu selalu relatif dalam kerangka tertentu, misalnya suatu bahasa atau suatu kesatuan budaya tertentu. Lihat W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 2nd edition* (Boston-London-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapore: Allyn and Bacon, 1994), hlm. 71. Lihat juga Chris Barker, *Cultural Studies: Theory and Practice* (London-Thousand oaks-New Delhi: SAGE, 2000), hlm. 51, 65, 203.

³³ Lihat Kartodirdjo, *Sejak Indische*, hlm. 106-112.

di masa depan.

Daftar Pustaka

Ankersmit, F.R. *History and Tropology: The Rise and Fall of Metaphor* (Los Angeles: University of California Press, 1994)

Barracough, Geoffrey. *Main Trends in History* (New York-London: Holmes & Meier, 1991)

Budiawan, *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto* (Jakarta: ELSAM, 2004).

Cribb, Robert, *Historical Atlas of Indonesia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2000)

Croce, B. “History and Cronicle”, dalam: Hans Meyerhoff, *The Philosophy of History in Our Time: An Anthology* (New York: Anchor Original Publisher, 1959).

Drake, Christine. *National Integration in Indonesia: Patterns and Policies* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1989)

Garraghan, Gilbert J. *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957)

<http://en.wikipedia.org/wiki/Liberation> (Dikunjungi tanggal 20 November 2009).

<http://www.britanica.com> (Dikunjungi tanggal 15 November 2009).

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida#Deconstruction (Dikunjungi tanggal 10 Desember 2009).

Kartodirdjo, Sartono. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: Gramedia, 1982).

_____, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

1994)

_____, *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984).

_____, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium I* (Jakarta: Gramedia, 1988)

_____, *Sejak Indische sampai Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2005)

Klooster, H.A.J. *Bangsa Indonesia Menulis Sejarahnya Sendiri*. Draf terjemahan oleh Suhardi (1992)

Kung, Hans. *Etika Ekonomi dan Politik Global: Mencari Visi Baru bagi Kelangsungan Agama di Abad XXI* (Yogyakarta: Qalam, 2002), hlm. 160. Lihat juga Subekti, “Bagaimana Menyikapi Overproduksi”

Loomba, Ania. *Kolonialisme/ Pascakolonialisme* (Yogyakarta: Bentang, 2003)

Morrow, R. *Critical Theory and Methodology* (Newbury Park, Calif: Sage, 1994). Lihat juga W.L. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Boston: Allyn & Bacon, 1994).

Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 2nd edition* (Boston-London-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapore: Allyn and Bacon, 1994), hlm. 71. Lihat juga Chris Barker, *Cultural Studies: Theory and Practice* (London-Thousand oaks-New Delhi: SAGE, 2000)

Purwanto, Bambang. “Sejarawan Akademik dan Disorientasi Historiografi: Sebuah Otokritik”, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada* (Yogyakarta: 28 September 2004).

- _____ & Asvi Warman Adam, *Menggugat Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2005).
- Rendra, W.S. *Rakyat belum Merdeka: Sebuah Paradigma Budaya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).
- Sharpe, Jim "History from Bellow", dalam: Peter Burke, *New Perspectives on Historical Writing* (Cornwall: Polity Press, 1991)
- Slamet Subekti, "Bagaimana Menyikapi Overproduksi Historiografi dalam Era Postmodern: Pembelajaran dari Perspektif F.R. Ankersmit untuk Proyeksi Diri Keindonesiaan", makalah disampaikan pada *Konferensi Nasional Sejarah VIII* (Jakarta: 14-17 Nopember 2006).
- Sulistiyono, Singgih Tri. "Writing of Indonesian Maritime History and National Integration in the Era of Regional Autonomy", paper disampaikan pada *The 2nd International Conference on Indonesia: Democratic Transition and Structural Reformation* (Universitas Diponegoro Semarang, 7-8 Juli 2004), hlm. 6-7.
- _____, "Sejarah Maritim Nusantara: Perkembangan dan Prospeknya", makalah dipresentasikan pada *Seminar Arkeologi Maritim* yang diselenggarakan oleh Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (Jakarta: 15 Januari 2008).
- Tjiptoherijanto, Prijono. "Economic Crisis in Indonesia: General Consequence of People's Life and Policy Implications", paper dipresentasikan pada *The Conference on the Modern Economic History of Indonesia* (Yogyakarta: 26-28 Juli 1999)